

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrita, Indra. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta : Absolute Media.

Asyhadie, H. Zaeni, and Kusuma, Rahmawati. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media.

Harahap, A. M. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*.

Hidayat Hukaram, S.H. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Telaumbanua, Dalinama. 2019, *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.

Wijayanti, Asri. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal :

Agus, Dede. (2023). Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8.1.

Apriawal, Jabbal. (2022). Resiliensi Pada Karyawan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*. 1(1).

Aziz, A., Handriani, A., and BASRI, H. (2019) Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1).

Febriana, A. P. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Leemanagement Terhadap Pekerja/Buruh Wanita. *Law, Development and Justice Review*, 4(2).

- Frivanti, Siti dan Dwi Aryanti Ramadhani. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Perusahaan untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1.
- Gunadi, Fitriana. (2021). Upah Proses Dalam pemutusan hubungan Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(4).
- Hadi, Abdul. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Surya Kencana Setu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 2.
- Hakim, Mukhlis Yunus, et.al. *Hubungan Industrial: Kasus Dan Perspektif Perbandingan Antar Negara*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, n.d
- Hendrik, H., Hendro, G, dan Putra Hutomo. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Global Education* 4(3).
- Hidayani, Sri., and Muthe, Riswan. (2018). Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha. *Jurnal Mercatoria*, 11(2).
- Ibrahim, Kalingga Maulana, Nyoman Sugiarta, and I. Putu Gede Seputra. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pemberi Kerja dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(1).
- Kahfi, Ashabul. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2).
- Laili, A. R. (2022). Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah*.
- Latupono, Barzah. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3.
- Manik, Rahmat GM., (2017). “Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kesalahan Berat Setelah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dicabut Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003”. *Melayunesia Law*, Vol 1, No 1,

- Manuaba, Ida Bagus Kade Putra., dan Sadniyi, Ida Ayu., (2018). Perlindungan Dan Upaya Hukum Bagi Pekerja Karena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1).
- Marigan, Nikodemus. (2015). *Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara Sepihak oleh perusahaan menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. PhD Thesis. Tadulako University.
- MASWANDI. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5 (1).
- Pakpahan, Tri Manisha Roitona, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3).
- Prameswari, Karina; HANDAYANI, Emi Puasa. (2020). Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Karyawan Dengan Perusahaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.(1).
- Purnomo, P., dan Soekirno, S. (2022). Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum universitas Krisnadwipayana*, 4(1).
- Purnomo, Sugeng Hadi. (2019). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.(2).
- Rohendra Fathammubina, S.H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3.(1).
- Simanjutak, Sari, Abdul Lawali Hasibuan, dan Ridho Mubarak. (2017). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Kepada Pekerja pada Putusan No. 36/G/2014/PHI Medan". *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum* 4(1).
- Sinaga, Niru Anita., and Zaluchu, Tiberius. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri* 6.
- Sugiarti, Yayuk. (2020). Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19. *Justitia Jurnal Hukum*. 4(2).

TELAUMBANUA, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish, 2019.

Turangan, Ryan A. (2016). Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*. 4(1).

WIBOWO, Rudi Febrianto; HERAWATI, Ratna. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.(1).

Zairudin, A. (2022). Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Dalam Hukum ketenagakerjaan. *Legal Studies Journal*, 2(1).

Zulaichah, Siti. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*. Volume 3 Issue 4.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja (JAMSOTEK).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Website :

CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230106164855-4-403518/wahai-pengusaha-anda-tidak-bisa-phk-karyawan-sepihak-lho>, diakses pada 28 September 2023 jam 11.50 WIB.

- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103185623-92-565483/pengusaha-soal-pidana-bila-tak-beri-pesangon-mengerikan>, diakses pada 27 Januari 2024 jam 23.26 WIB.
- DAARUTTAUHID.ORG. <https://www.daaruttauhid.org/apakah-islam-mengatur-soal-phk/>, diakses pada 23 Januari 2024 jam 10.52 WIB.
- Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-5886006/saya-di-phk-tanpa-pesangon-bisakah-saya-pidanakan-pengusaha#google_vignette diakses pada 27 Januari 2024 jam 23.14 WIB
- Kumparan.com. <https://kumparan.com/rachelfayza/sanksi-bagi-perusahaan-yang-tidak-memenuhi-hak-ketenagakerjaan-di-tengah-pandemi-1uonDKJXSMD>, diakses pada tanggal 6 September 2023 jam 10.35 WIB.
- Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/02000051/pelanggaran-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan>, diakses pada 10 September 2023 jam 14.21 WIB.
- LSPHukum Indonesia. <https://www.lsp hukum indonesia.co.id/berita/tak-terima-phk-sepihak-ini-upaya-hukum-yang-bisa-ditempuh/>, diakses pada 1 Oktober 2023 jam 18.51 WIB.